

**KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TAKALAR  
(STUDI KASUS MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN  
KECAMATAN MANGARABOMBANG, KABUPATEN TAKALAR)**

*STUDY OF SOCIAL ASPECTS IN  
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF  
TAKALAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT PLAN  
(CASE STUDY OF COASTAL COMMUNITIES AND FISHERMAN  
IN MANGARABOMBANG DISTRICT, TAKALAR DISTRICT)*

**ANDI ZULKARNAIM SUMANG  
(P032192001)**



**PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TAKALAR  
(STUDI KASUS MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN  
KECAMATAN MANGARABOMBANG, KABUPATEN TAKALAR)**

*STUDY OF SOCIAL ASPECTS IN  
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF  
TAKALAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT PLAN  
(CASE STUDY OF COASTAL COMMUNITIES AND FISHERMAN  
IN MANGARABOMBANG DISTRICT, TAKALAR DISTRICT)*

**ANDI ZULKARNAIM SUMANG  
(P032192001)**



**PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**STUDY OF SOCIAL ASPECTS IN  
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF  
TAKALAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT PLAN  
(CASE STUDY OF COASTAL COMMUNITIES AND FISHERMAN  
IN MANGARABOMBANG DISTRICT, TAKALAR DISTRICT)**

**ANDI ZULKARNAIM SUMANG  
(P032192001)**



**ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STUDY PROGRAM  
GRADUATE SCHOOL  
HASANUDDIN UNIVERSITY  
MAKASSAR, INDONESIA  
2023**

TESIS

KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TAKALAR  
(STUDI KASUS MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN DI  
KECAMATAN MANGARABOMBANG, KABUPATEN TAKALAR)

ANDI ZULKARNAIM SUMANG  
P032192001

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Pengelolaan Lingkungan  
Hidup Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin  
pada tanggal 13 Desember 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

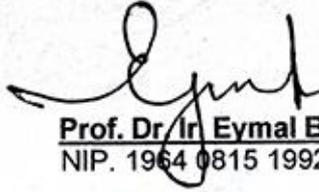
Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.  
NIP. 19750823 200212 1 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ir. Eymal B. Demmallino, M.Si.  
NIP. 1964 0815 1992 02 1 001

Ketua Program Studi  
Pengelolaan Lingkungan Hidup



Dr. Ir. Muhammad Farid Samawi, M.Si.  
NIP. 19650810 199103 1 006

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.MedEd.  
NIP. 19661231 199503 1 009

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

Nama : Andi Zulkarnaim Sumang  
NIM : P032192001  
Program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Judul : Kajian Aspek Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (Studi Kasus Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengembalian alihan tulisan orang lain dengan arahan dari komisi pembimbing **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.** sebagai **pembimbing utama** dan **Prof. Dr. Ir. Eymal B. Demmallino, M.Si.** sebagai **pembimbing pendamping**. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Desember 2023



Andi Zulkarnaim Sumang  
NIM. P032192001

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah ‘Azza wa Jalla, yang hanya Dia semata yang berhak disembah, atas berkah, nikmat iman dan Islam serta rahmat-Nya sehingga Tesis dengan judul “**Kajian Aspek Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (Studi Kasus Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar)**” dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan guna mencapai derajat Magister Lingkungan pada Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup, minat studi Sosial-Ekonomi Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dalam pelaksanaan studi ini penulis banyak mendapatkan baik dari perorangan maupun instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.** dan **Prof. Dr. Ir. Eymal Bahsar Demmallino, M.Si.** selaku komisi penasihat atas bantuan dan bimbingannya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
2. **Dr. Ir. M. Rijal Idrus, M.Sc., Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si., dan Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si.,** selaku penguji yang telah memberikan pengetahuan baru dan masukan serta saran dan kritik yang membangun.
3. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa** selaku Rektor Universitas Hasanuddin
4. **Prof. Dr. dr. Budu, PH.D.,SP.M(K),M.MedEd.** sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
5. **Dr. Ir. Muhammad Farid Samawi, M.Si.** selaku ketua program studi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah memberikan arahan masukan terkait tesis ini.
6. Staf Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yakni bapak ibu yang telah mendidik penulis dalam menempuh pendidikan di Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.

Ucapan terima kasih dan limpahan kasih sayang melalui tesis ini penulis sampaikan kepada mereka yang telah berperan serta dalam proses penelitian, penulisan hingga penyelesaian tesis ini. Akhirnya dengan segala hormat dan

kerendahan hati penulis mengucapkan banyak trima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan segala kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan dalam penyusunan tesis ini. Besar harapan penulis, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama kepada penulis dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Makassar, 13 Desember 2023



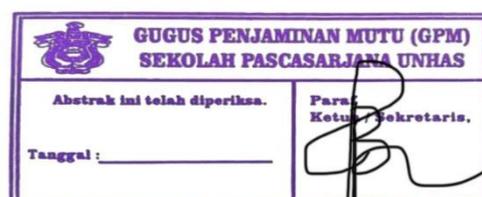
Andi Zulkarnaim Sumang

## ABSTRAK

**Andi Zulkarnaim Sumang**, Kajian Aspek Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (Studi Kasus Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar) **Dibimbing oleh, Tasrifin Tahara** (Pembimbing Utama) dan **Eymall B. Demmallino** (Pembimbing Anggota)

Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) telah ditetapkan sebagai salah satu dari 18 kawasan industri yang akan dikembangkan, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pelaksanaan pembangunan ini harus diiringi oleh peningkatan sumber daya manusia, dengan tujuan memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak rencana pembangunan kawasan industri takalar terhadap aspek sosial pembangunan, dan menganalisis dampak yang dianggap prioritas dalam rencana pembangunan KITA. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan menerapkan Focus Group Discussion (FGD), Analytical Hierarchy Process (AHP), dan Analisis Dampak Sosial pada tujuh informan. Tujuan utama adalah memahami pandangan dan harapan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan KITA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Laikang dan Desa Punaga memberikan persepsi positif terhadap perencanaan pembangunan KITA. Dari segi demografis, para petani melihat pembangunan ini sebagai peluang untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan melihat potensi bisnis yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi, seiring dengan peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan jumlah penduduk. Aspek ekonomi menekankan pada biaya sosial yang dibayarkan terkait dampak yang dirasakan akibat pembangunan KITA. Dalam konteks sosial-budaya, perbedaan budaya antara masyarakat lokal dan pendatang dianggap tidak akan menyebabkan konflik atau mengganggu kegiatan adat setempat. Analisis AHP menunjukkan bahwa prioritas dampak rencana pembangunan KITA dapat dibagi menjadi tiga kriteria utama. Demografi, dengan bobot 0,246, menyoroti Komposisi Penduduk sebagai faktor penting. Ekonomi, dengan bobot 0,299, menekankan Tingkat Pendapatan Masyarakat, sementara kriteria Sosial-Budaya, dengan bobot 0,359, menilai Budaya Maudu' Lompoa sebagai aspek yang signifikan. Dengan adanya Kawasan Industri Takalar, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan lapangan kerja dan peluang berusaha. Pembangunan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penyediaan fasilitas umum, memperkuat jaminan hukum, dan menerapkan tindakan lingkungan hidup yang bijaksana. Untuk mencapai tujuan ini, partisipasi aktif dari berbagai pihak dianggap sangat penting dalam pengembangan KITA, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kemajuan masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Persepsi Masyarakat, Kajian Dampak Sosial, Kawasan Industri Takalar.

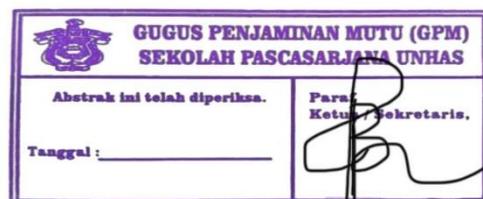


## ABSTRACT

**Andi Zulkarnaim Sumang.** *Study of Social Aspects In Environmental Management of The Takalar Industrial Area Development Plan (Case Study of Coastal Communities And Fishermen In Mangarabombang Sub-District, Takalar District).* **Supervised by Tasrifin Tahara** (Main Advisor) dan **Eymall B. Demmallino** (Member Advisor)

The Development Plan of Takalar Industrial Area (KITA) has been designated as one of the 18 industrial areas to be developed, in accordance with Presidential Regulation No. 18 of 2020 regarding the National Medium-Term Development Plan for the years 2020-2024. The implementation of this development must be accompanied by an enhancement of human resources, with the goal of providing positive benefits to the surrounding community, the majority of whom work as farmers. This research was conducted to understand the community's perception of the impact of Takalar industrial area development plan on social development aspects and to analyze the prioritized impacts in the KITA development plan. The research method used was quantitative descriptive approach, utilizing Focus Group Discussions (FGD), Analytical Hierarchy Process (AHP), and Social Impact Analysis with seven informants. The main objective was to comprehend the views and perceptions of the community regarding the planning of KITA development. The research results indicate that the communities in Laikang Village and Punaga Village have a positive perception of the KITA development plan. Demographically, farmers view this development as an opportunity to increase employment and see potential business opportunities that can improve economic conditions, alongside infrastructure improvement and population growth. The economic aspect emphasizes the social costs paid related to the perceived impacts of the KITA development. In the socio-cultural context, cultural differences between the local and immigrant populations are considered unlikely to cause conflicts or disrupt local customs. The AHP analysis shows that the priority of the impacts of the KITA development plan can be divided into three main criteria. Demographics, with a weight of 0.246, highlight Population Composition as a crucial factor. Economics, with a weight of 0.299, stress the Level of Community Income, while Social-Cultural criteria, with a weight of 0.359, evaluate the Maudu' Lompoa Culture as a significant aspect. With the development of Takalar Industrial Area, the community can enhance social well-being through increased employment and business opportunities. This development is also expected to improve public facilities, strengthen legal assurances, and implement environmentally sound actions. To achieve these goals, active participation from various parties is considered crucial in the development of KITA, ultimately positively impacting the progress of the local community.

**Key Words:** Society Perception, Social Impact Assessment, Takalar Industrial Area.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN Sampul .....	i
HALAMAN JUDUL (INGGRIS) .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1. Pembangunan Sosial .....	2
2.2. Aspek Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	7
2.2.1. Demografi .....	11
2.2.2. Ekonomi .....	11
2.2.3. Budaya .....	12
2.3. Perubahan Sosial dan Analisis Dampak Sosial .....	12
2.3.1. Perubahan Sosial .....	12
2.3.2. Analisis Dampak Sosial .....	16
2.4. Lingkungan Sosial Pesisir atau Nelayan .....	17
2.4.1. Tipe-Tipe Masyarakat Pesisir di Indonesia .....	18
2.4.2. Pemanfaatan Lingkungan .....	19
2.4.3. Masalah-Masalah yang Dihadapi Masyarakat Pesisir .....	21
2.5. Kawasan Industri .....	22
2.6. Kerangka Pemikiran .....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....	26
3.1. Pendekatan Penelitian .....	26
3.1.1. Pengertian Studi Kasus .....	26
3.1.2. Metode Pendekatan .....	27
3.2. Lokasi Penelitian .....	28
3.3. Waktu Penelitian .....	28
3.4. Informan Penelitian .....	29
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	31
3.5.1. Data Primer .....	31
3.5.2. Data Sekunder .....	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6.1. Diskusi Grup Sistematis ( <i>Focus Group Discussion</i> ) .....	32
3.6.2. Wawancara Mendalam ( <i>Indepth Interview</i> ) .....	34
3.6.3. Observasi .....	35
3.6.4. Dokumentasi .....	35
3.7. Teknik Analisis Data .....	35
BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	40
4.1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif .....	40

4.2. Pola Penggunaan Lahan .....	41
4.3. Kependudukan .....	42
4.4. Mata Pencaharian .....	44
4.5. Tingkat Pendidikan .....	45
4.6. Sarana dan Prasarana .....	46
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
5.1. Deskripsi Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) .....	49
5.1.1. Rencana Pembangunan KITA Tahap Pra-Konstruksi .....	52
5.1.2. Rencana Pembangunan KITA Tahap Proses Konstruksi .....	55
5.1.3. Rencana Pembangunan KITA Tahap Pasca Konstruksi/Operasional .....	58
5.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri .....	61
5.2.1. Persepsi yang Dipengaruhi Faktor Internal .....	62
5.2.2. Persepsi yang Dipengaruhi Faktor Eksternal .....	77
5.3. Analisis Dampak Prioritas dari Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) .....	83
5.3.1. Masyarakat .....	84
5.3.2. Pemerintah .....	86
5.3.3. Pemrakarsa .....	89
5.3.4. Kombinasi Dampak Prioritas Rencana Pembangunan KITA ....	91
5.4. Kesesuaian antara Harapan Masyarakat dengan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar .....	93
5.3.1. Harapan Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) .....	96
5.3.2. Kesesuaian Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) .....	96
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>103</b>
6.1. Kesimpulan .....	103
6.2. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Komponen dan Parameter Aspek Sosial Demografi .....	11
2. Komponen dan Parameter Aspek Sosial Ekonomi .....	11
3. Komponen dan Parameter Aspek Sosial Budaya .....	12
4. Kebutuhan Data .....	29
5. Skala Perbandingan Pasangan .....	37
6. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang Tahun 2019 .....	40
7. Penggunaan Lahan di Kecamatan Mangarabombang Tahun 2019 .....	41
8. Luas Lahan Sawah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang (Hektar) 2019 .....	42
9. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019 .....	43
10. Distribusi dan Kepadatan penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019 .....	44
11. Jenis Pekerjaan Utama dan Sampingan Masyarakat di Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Takalar, 2019 .....	45
12. Tingkat Pendidikan Responden di Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA), 2019 .....	46
13. Jumlah Gedung Sekolah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019 .....	47
14. Jumlah sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019 .....	48
15. Pembagian Peruntukan Kawasan Industri Takalar Seluas 3.500 Ha .....	50
16. Matriks Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri terhadap Aspek Demografi .....	65
17. Matriks Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri terhadap Aspek Ekonomi .....	69
18. Biaya Sosial terhadap dampak demografis pembangunan kawasan industri Takalar pada Petani/Peternak dan Nelayan Desa Punaga dan Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, 2023 .....	74
19. Matriks Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri terhadap Aspek Sosial-Budaya .....	77

## DAFTAR GAMBAR

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Struktur Lingkungan Hidup .....	9
2. Kerangka Pemikiran .....	25
3. Rangkaian Penentuan Informan dengan Teknik <i>Snowball Sampling</i> .....	30
4. Bagan Metode Analisis Data (Miles & Huberman, 1992) .....	36
5. Abstraksi Susunan Hirarki Permasalahan Saaty (1986) .....	39
6. Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) di Desa Laikang dan Punaga, kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar .....	50
7. Tahapan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) Sulawesi Selatan .....	51
8. Diagram Model AHP Dampak Prioritas Rencana Pembangunan KITA ..	84
9. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Demografi pada Stakeholder Masyarakat, 2023 .....	84
10. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Ekonomi pada Stakeholder Masyarakat, 2023 .....	85
11. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Sosial-Budaya pada Stakeholder Masyarakat, 2023 .....	86
12. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Demografi pada Stakeholder Pemerintah, 2023 .....	86
13. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Ekonomi pada Stakeholder Pemerintah, 2023 .....	87
14. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Sosial-Budaya pada Stakeholder Pemerintah, 2023 .....	88
15. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Demografi pada Stakeholder Pemrakarsa, 2023 .....	89
16. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Ekonomi pada Stakeholder Pemrakarsa, 2023 .....	89
17. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Sosial-Budaya pada Stakeholder Pemrakarsa, 2023 .....	90
18. Urutan Kombinasi Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Keseluruhan Informan pada Demografi, 2023 .....	91
19. Urutan Kombinasi Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Keseluruhan Informan pada Ekonomi, 2023 .....	91
20. Urutan Kombinasi Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Keseluruhan Informan pada Sosial-Budaya, 2023 .....	92

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini terus mengalami situasi yang dinamis akibat perubahan eksternal perekonomian global. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga menghadapi perubahan internal terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan berbagai persoalan seperti kesenjangan antar daerah, tingginya pengangguran dan kemiskinan. Munculnya ketimpangan tersebut merupakan fenomena yang sering terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Indonesia yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang kuat, mandiri, dan sehat dengan memposisikan sektor industri sebagai penggerak utama.

Perkembangan sektor industri sebagai bagian dari proses pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut terjadi dari aspek sosial ekonomi yang meliputi penghidupan masyarakat dari pertanian ke industri dan perdagangan serta terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, sedangkan dari aspek sosial budaya meliputi berkurangnya kekuatan pengikatan eksistensi nilai dan norma budaya karena adanya infiltrasi nilai dan norma-norma budaya baru yang dibawa oleh masyarakat pendatang (Nurkholis, 2015).

Menurut (Kwanda, 2000) kawasan industri adalah tempat di mana kegiatan industri terkonsentrasi dengan infrastruktur dan fasilitas yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan lahan industri. Kawasan industri harus mampu menggerakkan dan mendorong pengembangan industri kecil di sentra-sentra di luar kawasan padat karya melalui pemanfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Mengembangkan klaster-klaster usaha per wilayah dapat menjadikan industri sebagai umpan untuk pengembangan yang tersebar karena kawasan industri yang berkembang dengan baik terletak pada klaster-klaster usaha dan dapat berada di pedesaan dengan wilayah yang cukup

luas untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan industri pedesaan juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang secara tidak langsung terlibat dalam sektor industri dibandingkan dengan sektor pertanian.

Kementerian Perindustrian (Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri. Kementerian Perindustrian, 2010) mendorong pengelola kawasan industri di seluruh tanah air untuk terus memperluas salah satu lokasinya di Kabupaten Takalar. Pembangunan Kawasan Industri Takalar akan berlangsung di 2 desa kecamatan Mangarabombang, yaitu Desa Laikang, dan Desa Punaga. Kawasan industri ini akan fokus pada industri daur ulang logam *non-ferrous*, mulai dari pemisahan, pemurnian, peleburan, pengecoran hingga kombinasi komponen. Lokasi ini dinilai berpotensi menjadi kawasan industri metalurgi dengan sejumlah aspek konvergen. Sebagai contoh, wilayah strategis Kabupaten Takalar yang dilalui oleh jalur laut internasional yaitu Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 dan letaknya yang dekat dengan Pelabuhan Makassar hanya berjarak sekitar 25 km saja. Selain itu, Takalar memiliki wilayah geografis dengan pantai dan tepi laut yang dapat dijadikan sebagai kawasan pengembangan pelabuhan khusus.

Kawasan Industri Takalar telah mendapatkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Takalar, sehingga pengembangan Kawasan Industri Takalar dinilai layak lingkungan. KITA telah masuk dalam proyek strategis nasional di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 2020. Kawasan industri ini didasarkan pada rencana induk yang sudah ada dan siap dibangun di suatu kawasan peruntukan industri, serta dapat juga melihat kemajuan yang telah dicapai di lapangan sehingga perlu pengamatan langsung untuk mendapatkan data yang maksimal.

Rencana pembangunan kawasan industri Takalar harus dapat memberikan manfaat baik bagi kawasan maupun masyarakat sekitar. Manfaat yang dihasilkan tidak hanya berupa peningkatan perekonomian masyarakat tetapi juga pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga dapat

dijadikan sebagai kawasan industri yang menjadi industri utama pembangunan daerah tersebut. Peranan kawasan industri yang akan diterima oleh masyarakat perlu dikaji untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap perencanaan pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan rencana kawasan industri untuk kondisi berikut kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan kawasan industri, penulis telah melakukan penelitian **“Kajian Aspek Sosial Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (Studi Kasus Masyarakat Pesisir dan Nelayan di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar).”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka adapun masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial-budaya masyarakat Kecamatan Mangarabombang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Mangarabombang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar?
3. Apakah dampak prioritas yang dirasakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan industri Takalar?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengkaji kondisi sosial-budaya masyarakat Kecamatan Mangarabombang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar.
2. Mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Mangarabombang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar.
3. Mengetahui dampak prioritas yang dirasakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan industri Takalar.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Ada dua keuntungan dari penelitian ini, yaitu keuntungan teoritis dan keuntungan praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperkaya temuan penelitian yang ada dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Takalar. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan,

1. Memberikan wawasan kepada peneliti tentang pedoman kegiatan penelitian dan mengetahui perkembangan kawasan industri di Indonesia,
2. Sebagai salah satu pertimbangan untuk pengembangan kawasan industri lebih lanjut berbasis lingkungan. kesadaran sektor industri,
3. Sebagai informasi tentang inovasi dan perluasan studi sebelumnya Hal ini terkait dengan perkembangan sektor industri di Indonesia, dan
4. Akan dipertimbangkan atau dikembangkan lebih lanjut serta referensi untuk studi serupa.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pembangunan Sosial**

Perhatian telah lama diberikan pada aspek sosial pembangunan Indonesia, seperti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan aspek-aspek sosial ini dimasukkan dalam peraturan yang menentukan perlunya pengelolaan lingkungan sosial. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian pembaharuannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia telah lama terlibat dalam dialog mengenai keterkaitan antara keberlanjutan dan lingkungan sosial, berperan sebagai peserta yang aktif dalam penandatanganan perjanjian dan sebagai pendukung berbagai kesepakatan lingkungan tingkat internasional. Partisipasi Indonesia mencakup perjanjian yang dihasilkan dari Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada tahun 1972, serta melibatkan diri dalam konferensi yang signifikan pada tahun 1974, 1984, dan 1994. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro.

Semua perjanjian kelas dunia ini menekankan pentingnya hubungan antara manusia, sumber daya dan lingkungan serta perlunya memperhatikan kesinambungan hubungan antara manusia, sumber daya dan pembangunan. Agenda 21 UNCED bahkan menjelaskan bahwa manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan mempertahankan fungsi eko-sistem. Manusia ditempatkan sebagai sasaran dan tujuan pembangunan dan sekaligus sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Indonesia setuju dan menerima ide-ide yang terkandung dalam perjanjian.

Namun, dalam praktiknya, penerapan pengelolaan lingkungan sosial masih belum mencapai tingkat yang memadai. Faktor-faktor penyebabnya antara lain melibatkan kurangnya pemahaman umum mengenai konsep lingkungan sosial dan ketidaksepahaman dalam integrasi kebijakan pengelolaan lingkungan,

baik di tingkat nasional maupun daerah. Terdapat kecenderungan untuk memandang lingkungan alam sebagai entitas terpisah, yang terkadang dianggap terisolasi dari pengaruh lingkungan sosial dan struktur sosial secara keseluruhan.

Partisipasi Indonesia dalam perjanjian pembangunan lingkungan dan sosial internasional menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menempatkan manusia sebagai pusat dan hak mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif selaras dengan alam (prinsip pertama Agenda 21); Menggarisbawahi hak atas pembangunan dan kewajiban untuk menanggapi secara seimbang kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang dan mendatang (prinsip ketiga Agenda 21); menggarisbawahi perlunya pengentasan kemiskinan, agar pembangunan berkelanjutan (prinsip kelima Agenda 21); mempromosikan kebijakan demografis yang tepat dan mencegah pola konsumsi dan produksi yang tidak menjamin keberlanjutan (prinsip ke-9 Agenda 21); Prioritas diberikan kepada perempuan, pemuda dan komunitas lokal (Prinsip 20, 21, 22 Agenda 21).

Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Pembangunan Berkelanjutan juga menunjukkan bahwa pemahaman Indonesia akan pentingnya pembangunan sosial bagi masyarakat Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Indonesia setuju dengan Agenda 21 bahwa dunia berada dalam situasi terburuk karena kualitas hidup masyarakatnya tidak terjamin. Indonesia juga percaya bahwa kemiskinan, kesehatan yang buruk, impotensi, dan kelebihan penduduk memperburuk kondisi ekosistem manusia yang merupakan fondasi kehidupan dan kebahagiaan manusia. Indonesia juga harus sepakat bahwa harmonisasi pengelolaan dan pembangunan lingkungan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indonesia sepakat bahwa kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan dan setiap peningkatan kualitas hidup berarti didukung oleh pendidikan, kesehatan, gizi, identitas budaya, perlindungan hukum (HAM) dan masyarakat yang lebih baik. kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan berkelanjutan: manusia sebagai sumber nilai dan esensi sebagai alat atau nilai guna. Sebaliknya, jangan meremehkan orang seperti (Goeltenboth, 1990) menyatakan keprihatinan bahwa masyarakat adat di hutan lindung sering diperlakukan lebih buruk daripada spesies yang terancam punah. Filosofi pembangunan

berkelanjutan ini mirip dengan model "ekologi dalam" Fritjof Capra, karena tidak memisahkan manusia dari alam. Dunia tidak dilihat sebagai kumpulan objek diskrit, tetapi sebagai jaringan fenomena yang secara fundamental terkait dan saling bergantung (Capra, 2001). Menurut perspektif kedua ini, rencana pembangunan dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang memastikan tidak adanya pihak yang merugi, baik manusia maupun alam. Keberlanjutan dalam konteks ini merujuk pada bentuk pembangunan yang memungkinkan manusia untuk bertahan dan berkembang tanpa merusak ekosistem alam. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekologis. Dengan kata lain, rencana pembangunan yang berkelanjutan diarahkan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan manusia, keberlanjutan ekologi, serta nilai-nilai dan norma-norma sosial dan budaya. (Soemarwoto, 1991).

## **2.2. Aspek Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pembangunan berkelanjutan selalu mengejar peningkatan kualitas hidup masyarakat dan didasarkan pada prinsip kelangsungan kehidupan manusia, baik saat ini maupun di masa mendatang. Dalam konsep ini, manusia dilihat dalam semua aspek kehidupannya, bersama dengan komponen lingkungan alam dan lingkungan buatan, sebagai satu kesatuan yang dikenal sebagai lingkungan hidup. Lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997, merujuk pada kesatuan ruang yang mencakup segala benda, daya, keadaan, makhluk hidup (termasuk manusia) dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Lebih lanjut, pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2021 dan Undang-Undang (UU) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009, merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran, dan mengatasi kerusakan lingkungan hidup melalui kegiatan seperti perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkungan juga dianggap sebagai suatu sistem yang utuh, terdiri dari subsistem-subsystem yang saling terhubung, bergantung satu sama lain, dan dapat dioperasikan, membentuk kesatuan ekosistem secara total.

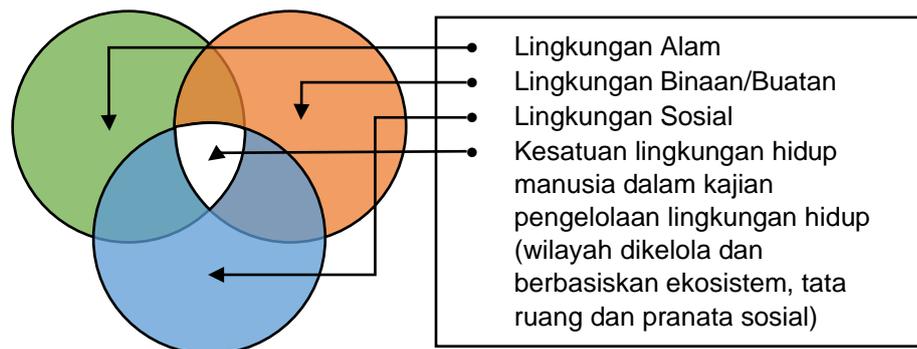
Dengan pemahaman sistematis tersebut, setelah membagi lingkungan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menggambarkan unsur-unsur lingkungan, maka analisis juga harus mencerminkan hubungan yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur lingkungan tersebut (Capra, 2001). Oleh karena itu lingkungan sosial, yang dianggap sebagai bagian dari lingkungan hidup, adalah suatu kawasan di mana terdapat banyak jenis interaksi sosial antara kelompok-kelompok yang berbeda dan lembaga-lembaganya, simbol-simbol dan nilai-nilai dan norma-norma yang mapan, baik alam maupun lingkungan buatan atau buatan. untuk lingkungan. Lingkungan (spasial). Pengertian lingkungan sosial ini mempertimbangkan hubungan antara semua komponen lingkungan; tidak hanya interaksi sosial, simbol, nilai dan norma, tetapi juga hubungannya dengan unsur lingkungan lainnya, alam dan lingkungan binaan atau buatan manusia.

Mengingat kompleksitas unsur-unsur dan hubungan unsur-unsur dalam suatu lingkungan sosial tertentu, wajar jika tidak semua orang dan semua kelas memahami apa yang disebut lingkungan sosial. Meski dikembangkan lebih dalam, ada berbagai konsep teknis yang mungkin tampak lebih rumit. Namun, hal ini harus dilakukan dengan melibatkan dan menyikapi seluruh lingkungan sosial, yang dapat dikelola melalui proses pengelolaan lingkungan sosial. Secara teoritis, pengelolaan lingkungan sosial dapat diartikan sebagai upaya atau rangkaian kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, memantau atau mengendalikan dan mengevaluasi yang dianggap komunikatif;

- a. Resistensi sosial (daya dukung dan kapasitas sosial lokal);
- b. Keadaan ekosistem;
- c. Tata letak;
- d. Kualitas sosial lokal (karakteristik objektif dan subjektif);
- e. Sumber daya sosial (kekuasaan) dan batasan (ketenangan) (di-manifestasikan sebagai institusi, pengetahuan lingkungan, dan etika lingkungan);
- f. Penghormatan terhadap asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup.

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, pengelolaan lingkungan sosial ini tidak terjadi begitu saja. Kegiatan ini disebabkan oleh banyaknya perubahan yang terjadi dengan pelaksanaan pem-bangunan yang pesat, ketika pengelolaan sosial (tradisional) sebelumnya tidak lagi bersifat prediktif. Kita membutuhkan sumber daya pengelolaan sosial yang lebih harmonis dan seimbang dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat. Oleh karena itu, perlu diketahui secara lebih tepat bagaimana komponen-komponen lingkungan tersebut saling berhubungan.

Secara skematis, komponen lingkungan yang saling berinteraksi tersebut dapat digambarkan dalam tiga domain, yaitu aspek alam, sosial (*gribsrcct*) dan tempat buatan. Meskipun terdapat tiga aspek, namun dalam prakteknya setiap kategori tidak dapat dikaji secara parsial untuk setiap aspek, karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang solid yang disebut ekosistem (Soetaryono dalam Purba, 2005).



**Gambar 1.** Struktur Lingkungan Hidup.

Kesinambungan kehidupan dalam lingkungan sosial, menurut konsep di atas, terwujud melalui keberhasilan interaksi manusia dengan lingkungan alami. Ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, modifikasi lingkungan alam menjadi habitat nyaman, serta pembangunan sistem pertanian, industri, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Akibat dari aktivitas ini, terbentuklah lingkungan buatan manusia atau lingkungan binaan. Namun, keberhasilan interaksi dengan lingkungan alam saja tidak mencukupi. Pentingnya juga keberhasilan dalam hubungan antara manusia dengan lembaga dan pranata sosial, budaya, serta agama. Dalam kedua konteks ini, muncul konsep-konsep seperti ketahanan sosial, kualitas sosial, dan sumber daya sosial.

Sebagai contoh, ketahanan sosial merujuk pada kemampuan suatu masyarakat untuk hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sosialnya, serta kemampuan untuk pulih setelah mengalami bencana alam atau disintegrasi sosial. Daya dukung sosial menunjukkan kemampuan suatu wilayah atau ekosistem untuk mendukung kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat, sementara daya tampung sosial mencerminkan kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara harmonis, seimbang, rukun, tertib, dan aman.

Beberapa pandangan melihat lingkungan sosial sebagai interaksi di antara sekelompok orang atau individu yang dengan sukarela menempati suatu wilayah atau lokasi secara relatif permanen. Mereka terikat pada pranata sosial atau aturan yang telah dikembangkan, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam lingkungan ini, terjadi interaksi dan kerjasama di antara anggota kelompok, sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan pengertian ini, kelangsungan hidup mencakup bertahannya populasi melalui proses reproduksi atau regenerasi, bertahannya pranata sosial melalui proses seperti sosialisasi, enkulturasi, internalisasi, dan institusionalisasi, serta berlanjutnya kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan fisik melalui interaksi dengan lingkungan alam. Dalam konteks pengelolaan lingkungan sosial, konsep-konsep tersebut sering digunakan baik untuk perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Mereka membantu memahami kompleksitas interaksi manusia dalam suatu lingkungan tertentu dan membentuk dasar bagi upaya pengelolaan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis.

Kajian dampak sosial yang di muat di (Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 1994) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kajian-kajian komponen lain dalam pengelolaan lingkungan hidup. Komponen sosial yang ditelaah meliputi:

### 2.2.1. Demografi

**Tabel 1.** Komponen dan Parameter Aspek Sosial Demografi.

Komponen	Parameter
Struktur Penduduk	- komposisi penduduk - kepadatan penduduk
Perkembangan Penduduk	- pertumbuhan penduduk - mobilitas penduduk
Angkatan Kerja	- tingkat partisipasi angkatan kerja - tingkat pengangguran

Sumber: K-14 MNLH, 1994.

### 2.2.2. Ekonomi

**Tabel 2.** Komponen dan Parameter Aspek Sosial Ekonomi.

Komponen	Parameter
Ekonomi Rumah Tangga	- tingkat pendapatan - pola pendapatan
Ekonomi Sumber Daya Alam	- pola pemilikan dan penguasaan sumber daya alam - pola pemanfaatan sumber daya alam - pola penggunaan lahan - nilai tanah dan sumber daya alam lainnya - sumber daya alam milik umum
Perekonomian Lokal dan Regional	- kesempatan kerja dan berusaha - nilai tambah karena proses manufaktur - jenis dan jumlah aktifitas ekonomi non-formal - distribusi pendapatan - efek ganda ekonomi ( <i>multiplier effect</i> ) - produk Domestik Regional Bruto - pendapatan asli daerah - pusat-pusat pertumbuhan ekonomi - fasilitas umum dan fasilitas sosial - aksesibilitas wilayah

Sumber: K-14 MNLH, 1994.

### 2.2.3. Budaya.

**Tabel 3.** Komponen dan Parameter Aspek Sosial Budaya.

Komponen	Parameter
Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- adat-istiadat</li><li>- nilai dan norma budaya</li></ul>
Proses Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>- proses asosiatif (kerjasama)</li><li>- proses disosiatif (konflik sosial)</li><li>- akulturasi</li><li>- asimilasi dan integrasi</li><li>- kohesi sosial</li></ul>
Pranata Sosial Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>- ekonomi, misal hak ulayat</li><li>- pendidikan</li><li>- agama</li><li>- sosial</li><li>- keluarga</li></ul>
Warisan Budaya	<ul style="list-style-type: none"><li>- situs purbakala</li><li>- cagar budaya</li></ul>
Pelapisan Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>- pendidikan</li><li>- ekonomi</li><li>- pekerjaan</li><li>- kekuasaan</li></ul>
Kekuasaan dan Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- kepemimpinan formal dan informal</li><li>- kewenangan formal dan informal</li><li>- mekanisme pengambilan keputusan di kalangan masyarakat</li><li>- kelompok individu yang dominan</li><li>- pergeseran nilai kepemimpinan</li></ul>
Sikap dan Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Usaha atau Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Internal masyarakat</li><li>- Eksternal masyarakat</li></ul>
Adaptasi Ekologis	-

Sumber: K-14 MNLH, 1994.

## 2.3. Perubahan Sosial dan Analisis Dampak Sosial

### 2.3.1. Perubahan Sosial

Setiap masyarakat mengalami dinamika perubahan sepanjang rentang hidupnya. Perubahan tersebut dapat bervariasi, menarik perhatian, berpengaruh luas, berlangsung lambat, atau bahkan terjadi dengan cepat. Perubahan dalam masyarakat dapat mencakup norma-norma, pola perilaku individu, struktur organisasi, susunan dan stratifikasi sosial, serta lembaga kemasyarakatan. Penyebab perubahan masyarakat dapat bersumber dari dalam Masyarakat itu

sendiri atau dari luar masyarakat. Faktor-faktor internal masyarakat melibatkan aspek seperti pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik antar golongan, pemberontakan, atau evolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, jika penyebab perubahan berasal dari luar masyarakat, penting untuk memahami saluran-saluran yang dilalui selama proses perubahan. Hal ini diperlukan agar perubahan tersebut akhirnya dapat dikenal, diterima, diakui, dan digunakan oleh masyarakat luas. Saluran-saluran tersebut umumnya melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, pemerintahan, agama, rekreasi, dan lain sebagainya. Proses melalui lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam mengarahkan perubahan dan menyebarkannya di tengah masyarakat. Menurut Ibrahim (2002) industrialisasi dalam masyarakat agraris merupakan contoh nyata dari perubahan sosial yang memiliki dampak besar pada fondasi kehidupan manusia. Secara keseluruhan, perubahan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem dan struktur sosial. Proses industrialisasi mengubah pola hubungan kerja dari yang bersifat tradisional menjadi lebih modern dan rasional.

Perubahan sosial, menurut definisi dari Wiryohandoyo (2002), dapat diartikan sebagai suatu bentuk perkembangan peradaban manusia yang muncul sebagai hasil dari perubahan alam, biologis, dan fisik yang terjadi sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Selain itu, perubahan sosial juga mencakup perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Djazifah (2012). Menurut Selo Soemardjan dalam (Wulansari, 2009), perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Perubahan ini mempengaruhi sistem sosial masyarakat, melibatkan nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial mencakup transformasi dalam struktur sosial serta unsur-unsur budaya dan interaksi sosial dalam suatu komunitas.

Perubahan dianggap sebagai fakta sosial yang dapat terjadi karena adanya rencana dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan manusia. Perubahan yang direncanakan merupakan suatu transformasi yang dipertimbangkan dan dihitung dengan matang terkait manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Kecepatan atau lambatnya perubahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan tanggung jawab dari pihak yang

menjadi pelopor perubahan. Selain itu, kunci keberhasilan perubahan juga terletak pada sejalan atau tidaknya program yang dirancang dengan kebutuhan yang diakui oleh masyarakat. Pihak yang berupaya mewujudkan perubahan ini disebut sebagai "*agent of change*". Tugas utamanya adalah memimpin dan mengarahkan jalannya perubahan, serta bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran proses perubahan tersebut.

Dalam membentuk pola perilaku kehidupan masyarakat, terdapat beberapa aspek sosial yang memiliki peran penting. Salah satunya adalah pembentukan nilai-nilai peradaban yang bersifat rasional. Selain itu, adaptasi terhadap budaya dan persiapan untuk masa depan masyarakat juga merupakan aspek-aspek krusial. Seorang pembaharu tidak hanya dituntut untuk dapat beradaptasi dan menyatu dengan masyarakat, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab dan martabat yang tinggi demi perbaikan kehidupan masyarakat. Tantangan ini menjadi lebih kompleks, terutama ketika dihadapi dengan masalah yang bersifat kultural. Oleh karena itu, seorang pembaharu perlu dilengkapi dengan wawasan dan pandangan yang luas. Hanya dengan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai kultural dan konteks masyarakat, pembaharu dapat efektif dalam membentuk pola perilaku yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Perubahan alami dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi secara tidak disengaja atau otomatis. Dinamika ini bisa berlangsung dengan cepat atau lambat, tergantung pada tingkat keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, dan tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal. Perubahan yang terjadi secara otomatis membawa implikasi positif jika arah dan akibatnya memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Sebaliknya, perubahan alami dapat memiliki dampak negatif jika arah dan konsekuensinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan alami mewakili proses evolusi atau transformasi yang terjadi tanpa campur tangan aktif dari pihak luar.

Dalam menanggapi implikasi perubahan yang terjadi secara alami, beberapa filosof dan sejarawan terkemuka seperti Arnold Toynbee dan Spengler merekomendasikan perlunya pengembangan tata nilai baru, pandangan hidup baru, sikap-sikap baru, dan struktur institusional baru. Mereka menyoroti perlunya adaptasi terhadap perubahan yang semakin kompleks, meluas, dan mendalam. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan yang muncul, diperlukan

inovasi dalam nilai-nilai, pandangan dunia, serta cara pandang dan sistem yang baru (Mazidah, 2011). Rekomendasi ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi perubahan alami yang memerlukan penyesuaian, masyarakat perlu terbuka terhadap transformasi dalam nilai-nilai fundamental, paradigma berpikir, sikap, dan tata kelola institusional. Dengan mengembangkan pendekatan baru ini, diharapkan masyarakat dapat lebih efektif dan responsif dalam menghadapi perubahan yang terjadi secara alami dalam dinamika kehidupan mereka.

(Soekanto, 1986) mengungkapkan bahwa perubahan sosial dianggap sebagai suatu peristiwa yang melibatkan proses atau mekanisme tertentu dalam struktur kehidupan manusia. Proses terjadinya perubahan sosial dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yaitu:

- a. **Kontak dengan Budaya Lain.** Interaksi dan kontak dengan budaya lain dapat memicu perubahan sosial. Pertukaran ide, nilai, dan tradisi antarbudaya dapat memberikan kontribusi besar terhadap transformasi masyarakat.
- b. **Sistem Pendidikan Formal yang Maju.** Perkembangan sistem pendidikan formal yang canggih dan maju juga dapat menjadi pendorong perubahan sosial. Pendidikan yang baik memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan baru kepada individu, yang kemudian dapat memengaruhi perubahan dalam masyarakat.
- c. **Sikap Menghargai Karya dan Keinginan untuk Maju.** Sikap positif terhadap pencapaian dan karya seseorang, serta keinginan untuk mencapai kemajuan, dapat menjadi pendorong perubahan sosial. Semangat untuk berkembang dan mencapai tujuan baru dapat membawa dampak positif dalam masyarakat.
- d. **Toleransi.** Sikap toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat juga dapat memainkan peran penting dalam proses perubahan sosial. Toleransi menciptakan ruang bagi adaptasi terhadap ide dan nilai baru.
- e. **Sistem Terbuka.** Adanya sistem terbuka mengindikasikan bahwa masyarakat dapat menerima pengaruh dari lingkungan eksternal. Keberlanjutan perubahan sosial seringkali terkait dengan tingkat keterbukaan masyarakat terhadap ide dan inovasi dari luar.

Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat lebih baik memahami dinamika dan mekanisme yang terlibat dalam proses perubahan sosial dalam masyarakat.

### **2.3.2. Analisis Dampak Sosial**

Menurut (Richards, 2012), dampak sosial dapat diartikan sebagai akibat sosial dan budaya yang timbul pada kelompok manusia tertentu sebagai hasil dari tindakan, baik yang dilakukan oleh lembaga publik maupun swasta. Tindakan ini dapat mengubah gaya hidup, pekerjaan, kegiatan rekreasi, interaksi sosial, dan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampak ini secara keseluruhan mempengaruhi kemampuan individu untuk menjadi anggota masyarakat yang berdaya. Penilaian dampak sosial bertujuan utama untuk menciptakan lingkungan biofisik dan kondisi hidup manusia yang berkelanjutan serta mendukung kehidupan yang layak. Forest-Trends, sebagai LSM yang fokus pada isu kehutanan, mengakui peran integral masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan, perlu memperhatikan potensi dampak positif dan negatif yang mungkin muncul dari inisiatif pembangunan terhadap masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan untuk menilai dampak secara komprehensif dan menyeluruh, serta mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari proses pembangunan.

Dampak sosial menurut Surto Haryono dalam (Purwanto, 2015), dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak primer dan dampak sekunder. Dampak primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. Sedangkan lebih jelasnya Douglas dkk dalam (Kusmayadi, 2013) menjelaskan tentang analisis kebijakan dengan beberapa indikator seperti, (1) perubahan sistem sosial, (2) nilai-nilai individu dan kolektif, (3) perilaku hubungan sosial, (4) gaya hidup dan ekspresi mode serta, (5) struktur masyarakat. Sedangkan Fardani (2012) menyatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat.

Penelitian tentang evaluasi dampak, yang dimulai pada tahun 1969 (Burdge, 1994), menitikberatkan pada pentingnya memperhitungkan dampak fisik, budaya, dan lingkungan masyarakat sebagai aspek utama yang perlu dipertimbangkan. Evaluasi dampak sosial kemudian menjadi bagian integral dari

evaluasi dampak lingkungan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, ada kesadaran bahwa evaluasi dampak lingkungan belum sepenuhnya mampu memberikan pemahaman yang memadai mengenai dampak sosial. Sebagai respons terhadap kebutuhan akan penanganan yang lebih rinci terhadap dampak sosial, dokumentasi evaluasi dampak sosial berkembang dan menjadi suatu entitas terpisah dari evaluasi dampak lingkungan yang lebih umum.

Berdasarkan usulan (Burdge, 1994), terdapat beberapa variabel dalam analisis dampak sosial yang dapat diidentifikasi. Pertama, dampak pada populasi melibatkan penilaian terhadap perubahan populasi, aliran masuk dan keluar pekerja, fluktuasi populasi musiman, relokasi individu dan keluarga, perbedaan usia, jenis kelamin, serta komposisi etnis. Kedua, dampak pada struktur komunitas mencakup sikap masyarakat terhadap rencana pembangunan, dukungan atau penolakan dari kelompok kepentingan, perubahan jumlah dan struktur pemerintahan daerah, perencanaan dan penataan wilayah dalam rencana pembangunan, diversifikasi industri, ketidakadilan ekonomi, dan perubahan peluang pekerjaan. Ketiga, dampak konflik dapat dilihat dari kehadiran agensi eksternal, munculnya kelas sosial baru, pergeseran fokus komersial/industri dalam komunitas, dan kehadiran penduduk musiman pada akhir pekan. Keempat, dampak pada individu dan keluarga melibatkan perubahan dalam pola kehidupan sehari-hari, perubahan praktik keagamaan, perubahan dalam struktur keluarga, perubahan dalam struktur jaringan sosial, persepsi terhadap kesehatan dan keselamatan, serta perubahan dalam peluang waktu luang. Kelima, dampak pada kebutuhan infrastruktur komunitas melibatkan perubahan dalam kebutuhan infrastruktur, akuisisi lahan, dan dampak pada aspek budaya, sejarah, dan arkeologi (Firdausi, 2018).

#### **2.4. Lingkungan Sosial Pesisir atau Nelayan**

Pemahaman tentang lingkungan sosial pesisir di sini hampir sejalan dengan konsep masyarakat pesisir atau komunitas pesisir yang digunakan oleh beberapa kelompok. Dalam perspektif geografi-budaya, lingkungan sosial pesisir secara umum mencakup unit-unit kehidupan manusia yang menetap dan mengembangkan kehidupan sosial di daerah yang berdekatan dengan laut. Dengan kata lain, yang termasuk dalam kategori lingkungan sosial pesisir adalah masyarakat yang tinggal di daratan yang berdekatan dengan laut dan masyarakat yang secara khusus menghabiskan sebagian besar hidup mereka di

atas perairan laut. Dalam konteks ini, komunitas perairan (seperti Orang Laut di Kepulauan Riau dan Orang Bajau di perairan sebelah timur Pulau Sulawesi) juga dapat dianggap sebagai bagian dari lingkungan sosial pesisir. Bagi komunitas ini, ketergantungan hidup mereka terhadap sumber daya alam daratan sama besarnya dengan ketergantungan mereka terhadap sumber daya perairan.

#### **2.4.1. Tipe-Tipe Masyarakat Pesisir di Indonesia**

Meskipun Indonesia negara kepulauan (*archipelago*), akan tetapi hanya sebagian kecil saja dari penduduknya yang berdiam, hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pesisir. Berdasarkan hubungan, adaptasi dan pemahaman terhadap daerah pesisir dengan segala kondisi geografisnya, maka masyarakat yang berdiam di pesisir setidaknya dapat kita kategorikan menjadi tiga.

##### **a. Masyarakat Perairan**

Kesatuan-kesatuan sosial yang hidup dari sumber daya perairan (laut, sungai atau pantai), cenderung terasing dari kontak-kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, lebih banyak berada di lingkungan perairan dari pada darat, dan berpindah-pindah tempat di suatu wilayah (teritorial) perairan tertentu. Kehidupan sosial mereka cenderung bersifat egaliter, dan hidup dalam kelompok-kelompok kekerabatan setingkat klen kecil. Berbagai literatur etnografi menunjukkan bahwa masyarakat asli setempat yang benar-benar menggantungkan kehidupan ekonomi subsistensinya dari sumber daya perairan dapat dihitung dengan jari.

##### **b. Masyarakat Nelayan**

Golongan masyarakat yang dapat dianggap paling banyak memanfaatkan hasil laut dan potensi lingkungan perairan dan pesisir untuk kelangsungan hidupnya. Masyarakat nelayan umumnya telah bermukim secara tetap di daerah-daerah yang mudah mengalami kontak-kontak dengan masyarakat-masyarakat lain. Sistem ekonomi mereka tidak dapat lagi dikategorikan masih berada pada tingkat subsistensi; sebaliknya sudah masuk ke sistem perdagangan, karena hasil mereka laut yang mereka peroleh tidak dikonsumsi sendiri, tetapi didistribusikan dengan ekonomis kepada pihak-pihak lain. Sungguhpun hidup dengan memanfaatkan sumber daya perairan, namun sebenarnya mereka lebih banyak menghabiskan kehidupan sosial-budayanya di daratan.

Dari perspektif kesukubangsaan atau etnisitas, masyarakat nelayan seperti ini dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari suku bangsa yang lebih luas. Mereka dibedakan dari kelompok-kelompok lain dalam sukubangsanya karena adanya sub-kebudayaan kelautan yang khas. Selain itu, terdapat desa-desa nelayan yang terbentuk akibat migrasi masyarakat nelayan dari sukubangsa lain, contohnya desa-desa nelayan keturunan Bugis di pantai timur Sumatera. Interaksi sosial yang luas dengan dunia luar mengakibatkan terjadinya perubahan yang lebih dinamis di kalangan masyarakat nelayan semacam ini.

### **c. Masyarakat Pesisir Tradisional**

Masyarakat-masyarakat pesisir seperti ini memang berdiam dekat perairan laut, akan tetapi sedikit sekali menggantungkan kelangsungan hidup dari sumber daya laut. Mereka kebanyakan hidup dari pemanfaatan sumber daya daratan, baik sebagai pem-buru dan peramu ataupun sebagai petani tanaman pangan ataupun jasa. Meskipun sebagian warganya bisa memanfaatkan sumber daya perairan, akan tetapi jumlahnya sedikit dan nampak sekali mereka lebih menguasai pengetahuan mengenai lingkungan darat daripada perairan, lebih mengembangkan kearifan lingkungan darat daripada laut. Jadi masyarakat pesisir seperti ini tidak dapat di-samakan dengan masyarakat nelayan ataupun masyarakat perai-ran yang memiliki ketergantungan hidup sangat besar kepada sumber daya perairan.

### **2.4.2. Pemanfaatan Lingkungan**

Subsisten adalah istilah yang merujuk pada kegiatan memperoleh makanan secara sederhana dan diambil sebagian kecil dari sumber daya yang tersedia. Kegiatan subsisten lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan konsumsi sendiri (*subsistence economic*) daripada untuk keperluan pertukaran atau perdagangan (*commercial economic*). Kegiatan hidup ini biasanya didukung oleh teknologi yang juga sangat sederhana, namun adaptif dengan lingkungan. Masyarakat pesisir yang hidup dari berburu binatang liar dan meramu (mengumpulkan) tumbuhan dan hewan kecil sebagai makanan menciptakan peralatan sederhana yang dapat diperoleh langsung dari alam

seperti tombak, panah, dan perangkap. Biasanya penggunaan peralatan untuk berburu dan meramu tersebut disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal mereka mengenai sifat-sifat dan guna binatang-binatang tersebut bagi kebutuhan hidup mereka.

Hanya sebagian kecil masyarakat pesisir yang hidup dari meramu sagu, khususnya beberapa masyarakat pesisir di Maluku dan Irian Jaya. Sedangkan yang tergantung kepada sistem ekonomi subsisten sumber daya laut umumnya mengembangkan cara-cara menangkap berbagai jenis ikan, seperti pancing dan kailnya, tangguk (serokan), bubu, jaring, jala, atau alat yang besar lebih kompleks seperti pukut, dan bagan. Pada dua dekade belakangan ini kepada masyarakat pesisir telah diperkenalkan pula suatu alat yang menggabungkan teknik penangkapan dan pemeliharaan ikan di perairan laut tenang, yaitu rumpon.

Masyarakat sederhana di perairan sungai-sungai besar di Irian Jaya bagian selatan, seperti orang Asmat sungguhpun pada zaman dulu tidak mengenal busana, tetapi memiliki suatu pengetahuan khusus untuk keamanan tubuh dari sengatan cahaya matahari di siang hari dan dinginnya cuaca di malam hari. Masyarakat yang berdiam di daratan luas berawa-rawa itu sengaja memoles tubuhnya dengan lumpur di siang hari agar tidak langsung terkena sinar matahari, dan memakai lemak babi pada malam hari untuk mengurangi rasa dingin. Selain itu mereka sengaja membuat rumah yang tidak berjendela dengan tungku yang apinya terus menyala di tengah rumah. Dengan cara itu mereka bisa mendapatkan hangat, sekaligus mengusir nyamuk dengan asap yang memenuhi ruangan. Sayangnya, dampak buruk kebiasaan ini terhadap kesehatan tidak terdapat dalam sistem pengetahuan mereka. Sementara itu masyarakat pesisir Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, sebelum mengenai alat tenun sebagian mengembangkan teknologi pembuatan pakaian dari kulit kayu.

Hampir semua masyarakat pesisir membuat rumah di atas tiang-tiang yang relatif tinggi dari tanah. Tujuannya bukan saja agar tidak terendam oleh air pada waktu air laut pasang naik, atau waktu hari hujan, tapi juga agar tidak diganggu oleh binatang-binatang kecil yang berkeliaran di tanah, seperti ular, kalajengking, lipan, semut dan serangga-serangga lain. Kolong rumah yang cukup tinggi itu juga mereka manfaatkan sebagai tempat membuang sampah domestik. Bahan-bahan untuk membangun rumah itu seluruhnya diperoleh dari lingkungan setempat. Daerah-daerah yang banyak ditumbuhi jenis palem rawa

seperti rumbia, nibung atau sagu memanfaatkan hampir semua bagian dari tumbuhan tersebut untuk keperluan rumah. Mulai dari batangnya yang dibuat dari batang nibung, atap dari anyaman daun rumbia, lantai dari bilah-bilah batang rumbia, dan dinding dari pelepah daunnya. Masyarakat pesisir di daerah lain memanfaatkan bambu atau pohon kelapa untuk membuat rumah. Lain halnya dengan komunitas-komunitas perairan yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka di atas air, seperti Orang Laut dan Bajau. Bagi masyarakat ini rumah mereka sekaligus adalah alat transportasi dan rumah tempat tinggal keluarga.

#### **2.4.3. Masalah-Masalah yang Dihadapi Masyarakat Pesisir**

Komunitas-komunitas yang berdiam di daerah pesisir kepulauan Indonesia tidak terkecuali relatif telah mengalami berbagai kontak kebudayaan dengan dunia luar. Bersamaan dengan itu berbagai pengetahuan dan teknologi peralatan dari luar juga telah mereka kenal dan dijadikan sebagai bagian dari sistem pemenuhan kebutuhan hidup. Relativitas kontak-kontak kebudayaan dan tingkat kemajuan kehidupan sosial ekonomi mereka menyebabkan adanya berbagai corak pengetahuan dan teknologi di antara masyarakat pesisir tersebut.

Mengingat pengetahuan dan teknologi tradisional tersebut merupakan hasil interpretasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap lingkungan alamnya, maka sifat adaptifnya dengan lingkungan sangatlah berbeda dengan teknologi moderen yang cenderung bersifat eksploitatif. Namun sifat pengetahuan dan teknologi asli setempat yang akrab dengan lingkungan tersebut dapat saja berubah akibat berubahnya lingkungan karena intervensi teknologi dan kebijakan pembangunan yang tidak layak. Sedangkan faktor penentu perubahan dari dalam umumnya ditimbulkan oleh makin besarnya kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam yang ada, terutama karena pertumbuhan penduduk berkat perbaikan perilaku sehat.

Persoalan yang umum terjadi di lingkungan pesisir pada masa kini adalah penurunan daya dukung lingkungan alam yang berbanding terbalik dengan tekanan akibat peningkatan jumlah populasi manusia dan penggunaan teknologi yang tidak arif lingkungan. Lingkungan alam pesisir pada masa dulu dianggap keras dan tidak cocok untuk kenyamanan hidup manusia, antara lain karena mudah dilanda bencana alam, bersuhu relatif lebih panas dan udaranya lembab, serta menjadi hidup nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Akan tetapi pada masa kini hambatan-hambatan alamiah tersebut tidak lagi dianggap

sebagai penghalang kehidupan manusia di daerah pesisir. Akibat berbagai tuntutan hidup dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong manusia untuk lebih mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan alam pesisir. Karena upaya memenuhi kebutuhan hidup dan berkat dukungan teknologi modern daerah pesisir sekarang dieksploitasi menjadi lahan pertanian pasang surut, tambak-tambak udang dan ikan, tambak garam, tambang minyak, tambang timah, dan tambang pasir. Pantai laut tidak sekedar digali tapi juga ditimbun, sehingga daratan menjadi lebih luas (reklamasi) untuk dijadikan tempat pemukiman, pabrik, pelabuhan dan lahan wisata.

Peningkatan kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan alam pesisir telah membantu kehidupan jutaan penduduk yang tidak memperoleh tempat di lingkungan lain. Akan tetapi penyesuaian diri yang umumnya dipicu oleh pembukaan lahan industri besar dengan sistem eksploitasi tersebut telah menimbulkan dampak yang tidak sedikit terhadap kelestarian lingkungan. Lingkungan pesisir semakin banyak kehilangan dukungan bagi keanekaragaman hayati alamiahnya, dan selanjutnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat-masyarakat pesisir tradisional yang seiam ini menggantungkan hidup kepada sumber daya alamiah tersebut. Contoh paling dekat adalah kepunahan komunitas nelayan Bagan Siapi-api di Sumatera bagian timur. Daerah Bagan Siapi-api yang dulu dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Sumatera, sekarang menjadi desa sepi karena perairan sekitarnya tidak lagi menghasilkan ikan atau udang. Para nelayannya sekarang beralih usaha atau pindah ke pesisir pulau-pulau lain.

## **2.5. Kawasan Industri**

Menurut National Industrial Zoning Committee's (USA) 1967, yang dimaksud dengan kawasan industri atau *Industrial Estate* atau sering disebut dengan *Industrial Park* adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, kesediaan semua infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi.

Di Indonesia pengertian kawasan industri mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015. Menurut peraturan pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang

dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri. Kebijakan pengembangan kawasan industri merupakan langkah yang ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan investasi di sektor industri serta memberikan kepastian hukum dan mengatur pengelolaan kawasan industri dalam suatu daerah. Kawasan industri adalah suatu daerah yang didominasi oleh aktivitas industri yang mempunyai fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan-peralatan pabrik (*industrial plants*), sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (Syahrudin, 2011).

Dirdjuwono (2014) menyebutkan, kawasan peruntukan industri merupakan bentang lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan. Perusahaan kawasan industri merupakan perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri, sedangkan perusahaan industri merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri di Indonesia. Zona industri adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri baik industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai penggerak utama secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan dan memiliki daya ikat spasial. Tujuan pengembangan kawasan industri adalah:

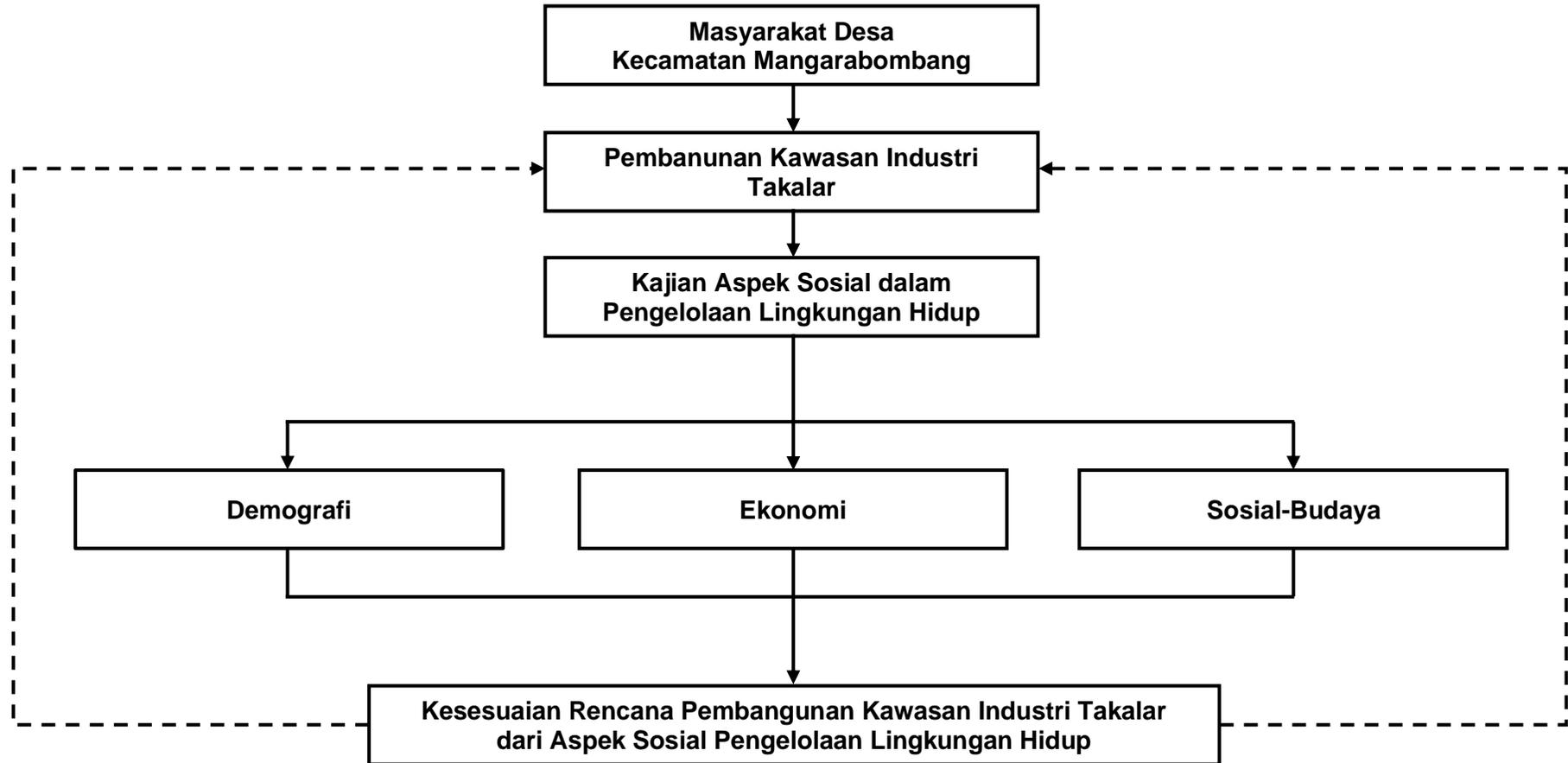
- 1) Tujuan utama sebagai alat untuk mengatur tata ruang dan meminimalkan kasus pencemaran terutama bagi daerah dengan iklim investasi tinggi.
- 2) Sebagai penciptaan (*stimulator*) iklim investasi bagi daerah-daerah yang remote.
- 3) Tujuan lainnya, yaitu menciptakan (mencari) profit.

Pengaruh pemilihan lokasi industri untuk suatu pusat kegiatan kerja terhadap keterlibatan masyarakat setempat seringkali tidak disadari. Padahal suatu kawasan perindustrian mempengaruhi secara langsung terhadap ribuan keluarga dan lebih banyak lagi secara tidak langsung. Lokasi pusat kegiatan kerja industri diperlukan untuk perjalanan ke tempat kerja. Pemilihan suatu lokasi secara tidak langsung meningkatkan atau mengurangi biaya sosial dan ekonomi bagi beberapa keluarga.

Keadaan fasilitas transpor yang tersedia ke lokasi seperti akses ke jalur kereta api atau jarak ke sistem jalan raya antar daerah akan menentukan tipe industri yang dapat beroperasi secara efisien pada saat pengembangan. Keragaman dari industri yang menarik di lokasi akan mempengaruhi kesempatan kegiatan kerja masyarakat di masa mendatang. Suatu program swadaya masyarakat secara substansial dapat dipengaruhi oleh fasilitas air dan selokan, dan peningkatan sistem jalan raya serta transportasi umum yang diperlukan oleh industri di masa depan.

Kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan baru yang dapat diartikan dalam dua cara, yaitu fungsional dan secara geografis. Pusat pertumbuhan secara fungsional berarti bahwa pada tempat tersebut merupakan pusat dari aktivitas atau lokasi konsentrasi dari usaha maupun industri yang ada dengan memberikan efek pertumbuhan dan perkembangan baik itu ke dalam maupun luar negeri dari lokasi industri tersebut. Sedangkan secara geografis maka pusat pertumbuhan diartikan sebagai suatu lokasi yang memiliki daya tarik sehingga mampu menarik berbagai macam usaha dan masyarakat akan bermukim di tempat tersebut. Suatu lokasi dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila memiliki empat ciri, yaitu (1) adanya hubungan antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, (2) adanya *multiplier effect* (unsur pengganda), (3) adanya konsentrasi geografis dan (4) bersifat mendorong daerah di belakangnya. Unsur pengganda muncul karena adanya keterkaitan antar sektor tersebut dan akan memacu pertumbuhan daerah belakangnya (Tarigan, 2016).

2.6. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2. Kerangka Pemikiran.